

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Peningkatan Pembangunan di Bidang Pendidikan

Keanekaragaman suku bangsa Indonesia, serta berbicara dalam berbagai bahasa daerah merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

Hakekat pembangunan di Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia . . .

Peningkatan pembangunan di bidang pendidikan tidak hanya pendirian prasarana berupa gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan dan melengkapi sarana seperti buku-buku pelajaran, buku-buku kepustakaan tetapi yang lebih utama adalah meningkatkan kualitas manusianya. Yang dimaksudkan kualitas manusianya adalah kepribadian dan kemampuannya.

Pengembangan kepribadian dan kemampuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas hidup manusia Indonesia melalui pendidikan adalah jalur yang strategis guna menumbuhkan manusia pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pendidikan diperlukan peningkatan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan Moral Pancasila dengan perilaku cinta tanah air dan bangsa, merupakan isi dan posisi pendidikan dengan kedudukannya yang mendasar, yaitu sebagai bagian dari pembinaan bangsa.

Apabila diresapi dan dihayati, maka nilai-nilai luhur Pancasila akan menjadi pendorong dan penggerak perilaku seseorang untuk berbuat.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, upaya menciptakan ketahanan Sekolah dengan program 5 K, yaitu Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan adalah menjadi sangat penting.

Melalui proses pendidikan, tujuannya agar siswa memperoleh bekal pengetahuan sehingga akan tumbuh kemauan keras pada dirinya untuk berbuat terhadap sesuatu.

Dalam hubungannya dengan Pendidikan Moral Pancasila maka diharapkan agar siswa berperilaku melaksanakan program 5 k menurut bekal pengetahuan Pancasila yang diperolehnya dari segi moral Pancasila.

Siswa sebagai pribadi manusia seutuhnya (indera, rasa, pikir, karsa, cipta, karya dan budi nurani), perlu dibina terutama aspek pengetahuan dan penalaran, moral, sikap, dan perilaku, serta keterampilan. Komponen-komponen Pembinaan Pendidikan Moral Pancasila pada pendidikan formal diterakan dalam Bagan 1 berikut ini.

2. Alasan Pemilihan Judul

a. Integrasi lambat

Keanekaragaman bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan golongan merupakan potensi yang besar untuk membangun bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi keanekaragaman penduduk dapat juga sebagai penghambat pembangunan, apabila tidak mendapat penanganan yang sebaik-baiknya.

Warga negara Indonesia keturunan Cina kendatipun telah menjadi warga negara Indonesia, tampaknya lambat untuk berintegrasi dengan penduduk Indonesia pribumi. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1971 : 373) adalah : "... faktor integrasi dengan lain-lain penduduk adalah suatu soal yang terutama menyangkut orang Cina di Indonesia ..."

Siswa-siswa WNI keturunan Cina tampaknya bersekolah hanya ke sekolah-sekolah tertentu saja yang menjadi pilihan mereka, sehingga keadaan yang demikian dapat menjadi salah satu faktor penyebab integrasi lambat.

Oleh karena mereka tampaknya hanya memilih sekolah-sekolah tertentu saja sehingga merupakan semacam pengelompokan.

b. Kehidupan berkelompok

Dalam kehidupan orang-orang Cina, kendatipun mereka sudah menjadi warga negara Indonesia senantiasa tampak bahwa dalam kehidupan mereka selalu bertempat tinggal secara berkelompok antara sesamanya. Dan sekolah-sekolah tertentu saja yang hanya menjadi tempat bersekolah bagi anak-anak warga negara Indonesia keturunan Cina.

Dengan melalui pengamatan langsung pada sekolah-sekolah yang merupakan sekolah relatif banyak siswa warga negara Indonesia berketurunan Cina-nya, adalah SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 2, SMA Methodist 1, serta SMA Methodist 2.

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari sumber data penelitian pada keempat sekolah tersebut di atas, diterakan dalam tabel 1 berikut ini.

Adapun sumber data penelitian tersebut, masing-masing diperoleh dari sumber data dokumen sekolah. Banyak siswa pada tabel ini masih termasuk siswa yang berstatus warga negara asing (WNA). Setelah siswa yang berstatus WNA tidak diperhitungkan, maka diperoleh tabel selanjutnya yaitu tabel 2.

TABEL 1

GAMBARAN KESELURUHAN SUMBER DATA PENELITIAN

No. Urt	Nama Sekolah	Banyak Kelas				Banyak Siswa			
		I	II	III	Σ	I	II	III	Σ
1.	SMA Xaverius 1	16	15	14	45	700	614	525	1839
2.	SMA Xaverius 2	10	10	10	30	455	413	406	1274
3.	SMA Methodist 1	18	15	17	50	841	693	786	2320
4.	SMA Methodist 2	5	4	3	12	233	160	145	538
	Σ	49	44	44	137	2229	1880	1862	5971

Sumber : Data dokumen sekolah

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang populasi siswa WNI keturunan Cina, diperoleh data yang bersumber dari data penelitian diterakan pada tabel berikut ini.

TABEL 2

POPULASI DAN SUB POPULASI SERTA PROSENTASENYA

No. Urt	Nama Sekolah	Populasi	Sub Populasi		Sub Populasi	
		Keseluruhan	A	Prosentase	B	Prosentase
1.	SMA Xaverius 1	1765	707	40,06	1058	59,94
2.	SMA Xaverius 2	1137	616	54,18	521	45,82
3.	SMA Methodist 1	1993	515	25,84	1478	74,16
4.	SMA Methodist 2	538	275	51,12	263	48,88
	Σ	5433	2113	38,89	3320	61,11

Sumber : Data dokumen sekolah

Keterangan : Sub Populasi A = Siswa WNI keturunan Cina
Sub Populasi B = Siswa Pribumi.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada SMA Xaverius 2, ternyata siswa WNI keturunan Cina sebanyak 54,18 % sedangkan siswa WNI Pribumi sebanyak 45,82 %, berarti siswa WNI keturunan Cina lebih banyak daripada siswa Pribumi.

Demikian pula pada SMA Methodist 2, ternyata bahwa siswa WNI keturunan Cina sebanyak 51,12 % sedangkan siswa WNI Pribumi sebanyak 48,88 %, yang berarti bahwa siswa WNI keturunan Cina lebih banyak daripada siswa WNI Pribumi.

Pada SMA Xaverius 1 terdapat 40,06 % siswa WNI keturunan Cina, sedangkan siswa WNI Pribumi sebanyak 59,94 %, dan SMA Methodist 1 terdapat siswa WNI keturunan Cina sebanyak 25,84 %, sedangkan siswa WNI Pribumi sebanyak 74,16 %

Kurikulum yang dipakai adalah sesuai dengan kurikulum dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. beserta petunjuk-petunjuk lainnya di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam lingkungan sekolah. Masing-masing sekolah tersebut telah mempunyai ruang perpustakaan dan laboratorium untuk praktek seperti praktek biologis, ruang fisika.

Ketahanan sekolah diupayakan oleh masing-masing sekolah yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah yang berintikan pada lima program

kegiatan, yaitu : Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan. Kegiatan dilakukan antara lain upacara bendera, peringatan dan perayaan hari-hari besar agama, dan hari-hari besar nasional serta pembinaan kerokhanian. Pelaksanaan kegiatan oleh pengurus OSIS dengan mendapat bimbingan dari para guru pembimbing.

Dengan data - data yang diperoleh seperti tersebut di atas, penelitian ini dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perilaku siswa WNI keturunan Cina dan Pribumi melaksanakan program 5K dalam lingkungan sekolah tersebut, sehingga akan terwujud Ketahanan Sekolah dan integrasi antara siswa WNI keturunan Cina dengan siswa WNI Pribumi.

B. Permasalahan

1. Masalah Integrasi WNI Keturunan Cina

Dalam rangka pembangunan bangsa, yang dalam masa proses perkembangan, maka hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara suku bangsa serta golongan tersebut perlu diupayakan. Oleh sebab itulah, maka Koentjaraningrat (1971 : 381) menegaskan pula yang diperlukan adalah : "... sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan ..."

Proses pembinaan dan perkembangan bangsa melalui pendidikan dalam lingkup sekolah merupakan jalur yang strategis.

Integrasi siswa WNI keturunan Cina dengan siswa Pribumi dalam lingkungan sekolah merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian untuk diteliti. Bagaimana perilaku siswa WNI keturunan Cina berintegrasi sesama siswa Pribumi melaksanakan program 5 K di sekolah sehingga akan terwujud Ketahanan Sekolah.

Adapun masalah integrasi WNI keturunan Cina di dalam penelitian ini ditinjau melalui beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Budaya

Kedatangan orang Cina di Indonesia sebagai emigran telah berlangsung lama dan melalui proses yang panjang, mereka menetap dan mempunyai mata pencaharian. Mereka dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu Cina Totok dan Cina Peranakan.

Adapun Cina totok ialah yang mempunyai ciri dalam keluarga senantiasa berbahasa Cina dan dengan kebudayaan Cinanya, dan selalu berorientasi dengan tanah leluhur mereka, yaitu negara Cina. Sedangkan Cina Peranakan adalah Cina yang berdarah campuran setelah kawin dengan penduduk Indonesia Asli. Ciri - ciri peranakan ini dapatlah dikenal

dengan bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu (Indonesia) sebagai bahasa pertama dan bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Mereka dilahirkan di Indonesia.

Namun demikian dalam berbagai aspek kehidupan, mereka masih banyak persamaan yang bisa dikenali atau diamati dalam tata kehidupan dan norma-norma yang berlaku berasal dari tanah leluhurnya.

"Rasa kesatuan keluarga tidak hanya terbatas di satu tempat tinggal/negara di mana mereka menetap saja, tetapi meliputi juga orang-orang Cina di seluruh dunia di mana mereka merantau dan menetap".

(Siswono Yudo Husodo, 1985 : 57).

Menyelusuri berbagai pandangan orang Cina, tidaklah hanya dalam alam kemerdekaan tetapi sejak awal abad 20 sebelum Perang Dunia Kedua. Cina totok menganggap negara Cina adalah negara mereka, sedangkan mereka bertempat tinggal di Indonesia adalah sebagai orang asing. Cina peranakan mempunyai anggapan yang berbeda-beda terhadap posisi mereka, sehingga dapat dibedakan ada tiga kelompok.

Kelompok pertama, beranggapan bahwa mereka sebagai orang asing berada di Indonesia, sedangkan negara Cina adalah negara mereka sendiri yang berhak melindungi dan kepada negara Cina tempat mereka berbakti. Anggapan kelompok pertama ini bersamaan pula

dengan pandangan Cina Totok.

Sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa Indonesia (Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua) adalah tanah jajahan Belanda, maka mereka berorientasi kepada pemerintah Belanda dengan tidak melepaskan keterikatan emosional dengan negeri Cina.

Konperensi Semarang tahun 1917, yang untuk pertama kalinya konperensi orang Cina di Jawa, seperti yang diungkapkan oleh Leo Suryadinata (1986 : 15) yang sebagian besar diikuti oleh golongan peranakan, menyatakan bahwa: "... mereka adalah orang asing dan tidak ingin terlibat dalam masalah politik setempat..."

Mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke negeri Belanda, setelah selesai sebagian kembali, tetapi sebagian besar menetap di luar negeri.

Seperti yang diungkapkan oleh Siswono Yudo Husodo (1985 : 114) yaitu :

Bagian terbesar di antara rekan-rekan WNI keturunan Cina ini, belajar di luar negeri atas biaya sendiri. Kita mendengar bahwa di antara mereka setelah menamatkan pendidikannya baik pada tingkat Bachelor, Master ataupun Ph.D, beberapa di antaranya tetap tinggal di negara tersebut, belajar, berkeluarga dan tidak kembali ke tanah air. Sebagian besar di antara mereka-mereka yang tidak kembali tersebut, kita dengar umumnya pemuda-pemuda WNI keturunan Cina.

Sedangkan kelompok ketiga adalah peranakan yang berorientasi kepada perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi, di Indonesia.

Sikap dan perilaku orang Cina tersebut di atas sebelum Perang Dunia Kedua berkelanjutan dalam alam kemerdekaan Indonesia. Sikap dan perilaku orang Cina tersebut di atas merupakan warisan dalam alam kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti yang diterakan di bawah ini.

1) Sifat dan solidaritas kelompok

Kehidupan orang-orang Cina di Indonesia sebagian besar bergerak di bidang ekonomi. Mereka selaku pedagang, meskipun ada yang menjadi petani, tukang atau yang lainnya. Kehidupan menjadi pedagang ataupun sebagai pengusaha yang tampaknya paling berhasil. Mereka hidup **cenderung** sesama mereka, mempunyai sifat dan ikatan solidaritas serta kesatuan hidup yang kuat.

Seseorang keturunan Cina adalah mereka yang memiliki sikap hidup (Siswono Yudo Husodo, 1985 : 62), yaitu : "Sikap hidup yang **esklusif**, hubungan keluarga yang ketat, serta kecenderungan untuk membentuk kelompok lingkungannya sendiri".

Mereka sangat kuat ikatan kesatuan kelompoknya dan sukar berintegrasi dengan kelompok lain. Dan Contoh yang dapat dilihat (Siswono Yudo Husodo, 1985: 58) pada :

Orang-orang Cina perantauan adalah bahwa

mereka selalu mempunyai lingkungannya sendiri, hidup secara **esklusif**, dengan tetap mempertahankan serta meneruskan **adat** kebiasaan kebudayaan dari tradisi leluhur ...

Sikap hidup seperti tersebut di atas adalah merupakan ciri atau perilaku dalam kehidupan mereka, sehingga **tampak berbeda** identitasnya dari golongan-golongan lainnya, yaitu WNI keturunan lainnya. Kenyataan pula, bahwa orang tua murid WNI keturunan Cina masih **banyak menyekolahkan** anak-anak mereka di sekolah-sekolah tertentu, sehingga tampak semacam pengelompokan.

2) Ketaatan kepada tanah air asal/leluhur

Kendatipun telah lama menjadi penduduk Indonesia dengan melalui proses yang panjang, akan tetapi mereka masih terikat dengan tradisi leluhur mereka, hidup berkelompok, bahkan keadaan yang demikian didukung oleh konsepsi hukum negara Cina, yaitu di manapun ia lahir tetap jadi warga negara Cina, karena ayahnya adalah keturunan Cina. Mereka merasa di manapun orang-orang Cina itu berada akan menganggap diri mereka adalah tetap warga negara Cina.

3) Kepedulian kepada kehidupan kebangsaan/nasionalisme

Oleh pemerintah Belanda, sejak tahun 1900

bahwa orang-orang Cina diperkenankan untuk mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak Cina. Sekolah yang didirikan tersebut adalah sekolah Tionghoa Hwee Koa dengan tujuan untuk memupuk perasaan nasionalisme Cina menyatakan orang-orang Cina perantauan, memupuk kebudayaan dan bahasa Cina.

Selain dari itu, pemerintah Hindia Belanda secara khusus mendirikan sekolah untuk keturunan Cina HCS (Hollandsch Chineesche School). Pendidikan bagi anak-anak Cina terdapat adanya pemisahan, yaitu :

Sebagian yang mengikuti pendidikan Cina berorientasi ke negara Cina dan sebagian lagi yang mengikuti pendidikan Indonesia dan Barat (Belanda), maka timbul pemisahan antara golongan yang berpendidikan berlainan itu. (Koentjaraningrat, 1971 : 363).

Karena pendidikan tersebut, sebagian orang Cina merasa lebih dekat terhadap tradisi dan negeri leluhur mereka, sebab mendapat didikan dari sekolah Cina dan sebagainya, merasa lebih dekat dengan orang Belanda daripada kaum Pribumi. Sekolah yang bercorak khusus tersebut **keadaannya** berlanjut hingga dalam masa kemerdekaan.

4) Kepedulian dalam kehidupan ekonomi

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan tentang kehidupan orang-orang Cina di negara

kita (Indonesia) yang sebagian besar bergerak di bidang ekonomi. Mereka selaku pedagang, meskipun ada yang menjadi petani, tukang ataupun lainnya. Kehidupan menjadi pedagang ataupun pengusaha yang tampaknya paling berhasil.

Dalam masa - masa penjajahan selaku penduduk Indonesia mereka mempunyai kedudukan yang berbeda lebih baik daripada bangsa Indonesia sendiri. Hal demikian dapat dilihat melalui peraturan dari Pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan Regerings Reglements 1907.

Menurut Regerings Reglements 1907, penduduk Indonesia digolongkan ke dalam orang Eropa, golongan orang Timur Asing, dan golongan orang Pribumi (Bumi Putera) yang masing-masing dikenakan hukum perdata yang berbeda-beda walaupun hukum pidananya disamakan.

Orang Cina di Indonesia sebagai golongan Timur Asing dalam hal hukum dagang disamakan dengan hukum Eropa. Kesempatan yang demikian itu merupakan peluang bagi orang-orang Cina untuk meningkatkan aktivitas mereka dan mengembangkan usaha dalam berbagai segi kehidupan terutama di bidang ekonomi.

Betapa besarnya konsentrasi orang-orang etnis Cina dalam perdagangan (Mely G.Tan, 1981:XV)

terlihat dari perbandingan dengan golongan-golongan lain, di mana : "Menurut sensus 1930 dari etnis Tionghoa 35,4 persen, dari orang Eropah 13,4 persen, sedangkan dari orang etnis Indonesia hanyalah 5,4 persen berkecimpung dalam perdagangan".

Selanjutnya menurut Mely G. Tan, bahwa :

Perbandingan tahun 1930 dengan tahun 1956 memperlihatkan pada mereka yang dilahirkan di Indonesia, persentase dalam perdagangan kurang lebih konstan, sedangkan para profesional (dokter, insinyur, dokter gigi) bertambah hampir dua kali.

Keberhasilan golongan Cina dalam perdagangan selain dari peluang peraturan Pemerintah Hindia Belanda, juga karena masyarakat Cina memiliki sifat-sifat yang menonjol (Siswono Yudo Husodo, 1985: 75), yaitu : "Hemat, tekun, luwes, berani berspekulasi serta bersemangat wirausaha yang tinggi. Faktor ini turut menunjang keberhasilan mereka dalam meningkatkan usaha-usaha perdagangannya".

Menurut Ong Eng Die (Mely G. Tan, 1981 : 34) bagi orang Tionghoa, bahwa : "Perdagangan sebagai lapangan pekerjaan yang terpenting, ... adalah suatu lapangan yang vital".

Dalam kenyataan hidup di kota-kota khususnya dalam kotamadya Palembang, ternyata pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko besar, seperti di daerah Pasar 16 Ilir, Jalan Jenderal Soedirman, 15 Ilir didominasi

oleh pedagang-pedagang Cina, dan sekaligus mereka bertempat tinggal di sana.

Kenyataannya juga menunjukkan seperti yang dituturkan oleh J. Panglaykim dan I. Palmer (Mely G. Tan, 1981 : 92), bahwa : "Anak - anak Tionghoa disekolahkan, dan dipersiapkan untuk meneruskan usaha orang tua mereka ... bahkan sampai kepada cucu ..."

Dalam kehidupan yang bertahun - tahun tersebut, dan bagi anak-anak mereka yang bersekolah untuk meneruskan usaha orang tua, maka perilaku dagang itulah yang akan menonjol di dalam kehidupan orang-orang Cina yang berarti perilaku kepada pertimbangan untung rugi, acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar.

b. Pendekatan Politik

Masalah integrasi WNI keturunan Cina berhubungan erat dengan perilaku dalam kehidupan orang Cina itu sendiri yang selalu berorientasi lebih banyak ke negara Cina sebagai tanah asal mereka, tidak terlepas dari situasi dan perkembangan politik di tanah air Indonesia ataupun di negeri Cina sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, yang dalam penelitian ini lebih memusatkan kepada status

kewarganegaraan dan pendidikan anak-anak Cina, selain dari aspek-aspek kehidupan lainnya yang juga memegang peranan penting dalam bermacam-macam kurun waktu.

Adapun status kewarganegaraan dan pendidikan, adalah sebagai berikut :

1) Status Kewarganegaraan orang-orang Cina Indonesia

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa golongan Cina peranakan terdiri dari tiga kelompok dengan masing-masing kelompok pertama berorientasi kepada negara Cina, kelompok kedua berorientasi kepada pemerintah Hindia Belanda, dan kelompok ketiga berorientasi kepada para pemimpin bangsa Indonesia, yang berjuang menuntut Indonesia Merdeka.

Sejalan dengan keadaan yang demikian pemerintah negeri Cina pada tahun 1909 sebelum perang dunia I, mengeluarkan undang-undang tentang kebangsaan yang isinya, bahwa semua orang keturunan Cina, atau setiap anak yang sah ataupun tidak sah dari seorang ayah Cina (atau seorang ibu Cina bila bapaknya tidak diketahui) adalah berkebangsaan Cina. Dengan demikian orang-orang Cina di Indonesia, adalah berkebangsaan

Cina (azas ius sanguinis).

Sedangkan tahun 1910, penguasa Belanda mengeluarkan Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda, yang menyatakan bahwa semua orang Cina Belanda adalah Kawula Belanda, diberlakukan. Dengan demikian orang-orang Cina di Indonesia, mempunyai kewarganegaraan secara rangkap. Timbul kegelisahan bagi orang Cina dan sebagian tidak setuju melancarkan kegiatan yang memihak perjuangan bangsa Indonesia, sehingga tahun 1932 didirikanlah Partai Tionghoa Indonesia, bahkan berusaha akan menjadikan orang-orang Cina peranakan menjadi Indonesiens seperti yang ditegaskan oleh Liem Koen Hian, bahwa "Indonesia adalah tanah air dan negara dari golongan Cina peranakan". (Leo Suryadinata, 1986 : 82). Terhadap gagasan Liem Koen Hian ini, para pemimpin bangsa Indonesia bersikap hati-hati.

Kendatipun Partai Tionghoa Indonesia (PTI) mengidentifikasikan dirinya dengan gerakan nasionalis Indonesia, partai ini menurut kenyataannya tetap merupakan suatu partai Cina peranakan, oleh karena itu belum merupakan suatu partai Indonesia, bahkan banyak dipengaruhi oleh pihak Komunisme.

Setelah proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, dengan melalui Undang-Undang No 3 tahun 1946 (telah

mengalami perubahan dan penambahan) tentang warga negara Indonesia dan penduduk negara Indonesia, maka Cina peranakan telah dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi negara Cina sejak tanggal 1 Oktober 1949 terpisah menjadi dua, yaitu negara daratan Cina disebut Republik Rakyat Cina (RRC) dengan ibu kota Peking, dan berhaluan komunis, sedangkan Republik Taiwan yang beribukotakan Taipei berhaluan nasionalis.

Republik Rakyat Cina (RRC) tentang kewarganegaraannya menganut azas ius sanguinis, dan menyatakan bahwa orang-orang Cina di Indonesia adalah warga negara RRC. Hal yang demikian berakibat terhadap orang-orang Cina yang berpihak kepada Republik Taiwan menjadi kehilangan kewarganegaraannya, dan mereka tidak mempunyai status kewarganegaraan sehingga dianggap sebagai orang asing, sedangkan Republik Indonesia mengakui RRC.

Persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi-Kewarganegaraan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958. Adapun isi daripada perjanjian tersebut adalah : "Tunduk kepada Undang-undang dan kebiasaan dari negara di mana mereka tinggal dan tidak akan ikut dalam kegiatan politik di negara tempat mereka bertempat tinggal!" Hal demikian

masih tersirat, bahwa orang-orang Cina di Indonesia bukan yang pro pemerintah Taiwan adalah statusnya warga negara Cina.

Sejak tahun 1958, pengaruh RRC semakin bertambah, lebih-lebih setelah pemerintah Republik Indonesia mengusir orang-orang Cina yang pro Taiwan dan menutup sekolah-sekolahnya, karena terbukti membantu pemberontakan PRRI/Permesta dan sekaligus pula memperlakukan Peraturan Pemerintah No. 10/1960 (PP 10/1960) yang isinya melarang pedagang Cina beroperasi di pedesaan.

Orang-orang Cina di Indonesia kendatipun telah menjadi warga negara Indonesia, akan tetapi orientasinya masih tetap ke tanah leluhur dan ikatan solidaritasnya kuat, lagi pula mendapat dukungan dari PKI dan RRC, menimbulkan suatu permasalahan. Tidak semua pejabat pemerintah yang mendukung dibentuknya "Poros Jakarta - Peking", karena akan memberikan peluang kegiatan dalam berbagai bidang pada golongan PKI, serta golongan Cina peranakan yang mendapat bantuan dan dukungan dari RRC.

Kenyataan menunjukkan dengan lahirnya pemberontakan G.30.S/PKI yang berusaha merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara Komunis, golongan Cina peranakan yang pro komunis terlibat,

dan akhirnya pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. PKI beserta dengan ormas-ormasnya mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat daerah dibubarkan. Tahun 1967 hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dibekukan.

Masalah dwi kewarganegaraan yang mengambang ini mempunyai dampak membahayakan terhadap kehidupan negara Republik Indonesia, akhirnya oleh pemerintah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sebagai penggantinya diberlakukanlah Undang-Undang No. 4 tahun 1969, yang isinya antara lain : "Seorang anak keturunan Cina di bawah umur secara otomatis mengikuti garis kewarganegaraan orang tuanya, sebab orang tuanya memilih kewarganegaraan Indonesia".

Kekhawatiran terhadap orang Cina Indonesia sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia (Leo Suryadinata, 1986 : 19), bahwa : "Selama tahun 1945-1946 banyak orang Cina yang dipakai sebagai alat Belanda baik sebagai polisi maupun sebagai pedagang".

Pada bagian lain yang sama halamannya, Moh. Hatta juga berpendapat, bahwa : "Orang Cina bersikap netral dalam perjuangan antara Belanda dengan orang-

orang Indonesia, serta kepentingan mereka yang paling utama adalah memperoleh keuntungan".

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1969, seandainya anak yang baru dilahirkan dengan status telah menjadi warga negara Indonesia, yaitu WNI keturunan Cina berarti usianya sekarang \pm 18 tahun dan duduk di bangku sekolah dengan jenjang tingkat SMTA, dan hidup dalam pemerintahan Orde Baru, maka penelitian yang dilakukan adalah sangat tepat dengan segala permasalahannya, terutama masalah integrasi warga negara Indonesia keturunan Cina tersebut.

2) Pendidikan

Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak Cina peranakan bermacam-macam adalah sesuai dengan orientasi dalam kehidupan mereka.

Golongan Cina peranakan yang berorientasikan ke nagara Cina mendirikan sekolah Cina yang disebut Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), dengan menggunakan bahasa pengantar Cina, dan juga dari golongan Cina Totok. Golongan Cina peranakan yang berorientasikan ke negara Belanda (pemerintah Hindia Belanda) memasuki sekolah HCS (Hollandsch Chineesche School) sekolah untuk Tionghoa dengan menggunakan

bahasa pengantarnya bahasa Belanda yang disesuaikan dengan model sekolah Eropah yang sengaja didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengimbangi sekolah Cina Tiong Hoa Hwee Koan.

Golongan Cina peranakan yang berorientasi kepada negara dan perjuangan bangsa Indonesia memasuki SD (Sekolah Dasar), yaitu sekolah negeri dan swasta yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Melayu (bahasa Indonesia). Pembukaan Sekolah Dasar untuk orang-orang Indonesia ini sesuai dengan politik pemerintah Hindia Belanda sendiri, yaitu Politik Ethisch di bidang pendidikan yang perlu di Hindia Belanda diberikan pendidikan dengan jalan mendirikan sekolah - sekolah. Lagi pula negeri Belanda dipimpin oleh pemerintah yang berhaluan Liberal.

Sedangkan pada masa pendudukan Jepang yang diperkenankan hanyalah sekolah-sekolah dasar yang berbahasa Melayu, dan dianjurkan juga dengan menggunakan bahasa pengantar Cina, sedangkan sekolah yang berorientasikan kepada pemerintah Hindia Belanda ditutup oleh Jepang. Corak pendidikan seperti di atas berlanjut hingga setelah Indonesia Merdeka.

Dalam masa perang Kemerdekaan (1945 - 1949)

Belanda mendorong dan memajukan sekolah - sekolah Cina, bahkan dalam bulan Oktober 1947, dikeluarkanlah peraturan pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah yang berbahasa Cina. Kita memahami bahwa sikap dan perilaku pemerintah Belanda tersebut, dimaksudkan agar supaya orang-orang Cina peranakan memberikan dukungannya terhadap penjajahan kembali Indonesia bagi Belanda.

Seperti telah dikemukakan terdahulu Mohamad Hatta Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, menyatakan bahwa : "Cina peranakan bersikap netral terhadap perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda".

Sejalan dengan situasi politik di negara Cina sejak tanggal 1 Oktober 1949, negara Cina terbagi menjadi dua, yaitu berdirinya Republik Rakyat Cina yang berhaluan Komunis, dan Republik Taiwan yang berhaluan Nasionalis, maka seolah - olah Cina peranakan di Indonesia jadi terpecah dua, yaitu sekolah-sekolah yang di bawah pimpinan orang-orang Cina Nasionalis atau Cina Kou Min Tang dan sekolah sekolah yang berada di bawah pimpinan orang-orang Cina Komunis dengan mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia, di mana sekolah-sekolah tersebut menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Cina.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas sekali pendidikan bagi orang-orang Cina peranakan sangat berorientasi kepada negara leluhur mereka, yaitu negara Cina (RRC dan Taiwan), lebih-lebih lagi pengaruh ideologi komunisme kepada sekolah-sekolah yang di bawah naungan Cina peranakan yang berorientasi ke Republik Rakyat Cina.

Sekolah-sekolah yang diasuh oleh Cina peranakan Taiwan akhirnya ditutup dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia, karena dalam kenyataannya orang-orang Cina peranakan Taiwan ikut membantu dalam pemberontakan PRRI/Permesta, menyelundupkan amunisi dan senjata dari Taiwan melalui Singapura, yang mana Cina peranakan Taiwan diperalat untuk kepentingan pemberontakan tersebut.

Sehubungan dengan pengambilalihan sekolah-sekolah Cina peranakan Taiwan oleh pemerintah Indonesia maka sekolah-sekolah yang diasuh oleh Cina peranakan berhaluan komunis semakin berkembang dengan pesatnya, terutama oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kebangsaan Indonesia) yang merupakan salah satu organisasi massanya PKI.

Demi kepentingan Nasional, maka Pemerintah Indonesia menetapkan pada sekolah-sekolah Cina tersebut untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, kurikulum berbahasa Indonesia, begitu

juga Sejarah dan Ilmu Bumi Indonesia menjadi mata pelajaran wajib. Akan tetapi pemerintah Indonesia sejak tahun 1959, kendatipun telah kembali kepada UUD 1945, pelaksanaan dalam pemerintahan didominasi oleh PKI.

Di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Prijono menetapkan 5 Pokok Perkembangan atau yang dikenal dengan Panca Wardhana yaitu :

1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan.
2. Perkembangan inteligensi.
3. Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir dan bathin.
4. Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan.
5. Perkembangan jasmani. (Said M., 1981 : 20).

Panca Wardhana mengecilkkan arti dasar negara Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hanya dengan istilah keagamaan saja, yang mengakibatkan terbukanya peluang bagi golongan komunis untuk mengembangkan ideologi komunisnya lewat dunia pendidikan.

Dalam pada itu Penetapan Presiden No. 19/1965, berbunyi : "Pengkhususan sistem Pendidikan Nasional diperkenankan, sesuai dengan aliran politik dan keyakinan agama yang dianutnya masing-masing dalam rangka Pancasila Manipol USDEK". (Said M., 1981 : 20).

Dengan pasal 5 Penetapan Presiden No. 19/1965, partai politik PKI lewat Baperkinya untuk kepentingan orang-orang Cina peranakan semakin mendapatkan kebebasan,

bahkan perlindungan untuk membina serta mengembangkan ideologi komunis melalui pendidikan.

Dapat dipahami kalau terhadap orang-orang Cina peranakan selalu diragukan itikadnya yang baik, atau "niatnya yang tulus" (Hamka, 1970 : 83) terhadap perilaku mereka kendatipun mereka itu dilahirkan, bertempat tinggal di Indonesia serta mendapat pendidikan di Indonesia.

Lebih-lebih lagi setelah Kudeta tahun 1965 yang dilakukan oleh G.30.S/PKI serta didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang mendapat dukungan dari Republik Rakyat Cina, ternyata golongan Cina peranakan banyak terlibat di dalamnya, kendatipun tidak semuanya. Kudeta 1965 itu akhirnya menemui kegagalan dan berhasil ditumpas. Sejalan dengan itu pada tahun 1966 melalui SUPERSEMAR-nya, PKI dibubarkan beserta ormas-ormasnya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sekolah-sekolah Cina ditutup dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia, karena terlibat serta ikut dalam pemberontakan PKI.

Guna menyalurkan siswa-siswa dari sekolah-sekolah Cina yang telah ditutup dan diambil alih tersebut serta untuk menampung anak-anak Cina peranakan, maka pemerintah berupaya dengan Peraturan Presiden No B.12/Pres/1/1968 yang memberikan izin untuk mendirikan sekolah yang disponsori oleh golongan swasta di

dalam masyarakat Cina. Sekolah-sekolah tersebut disebut dengan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK) yang berdiri pada tahun 1969.

Menurut pokok-pokok penjelasan tentang Sekolah Nasional Proyek Khusus dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 015/1968, tentang inti dari Konsepsi SNPK, adalah :

- 1) Melenyapkan eksklusivisme di bidang pendidikan baik rasial maupun teknis educatif, yaitu dengan membaurkan pendidikan anak-anak Cina dengan anak-anak Indonesia menurut sistem pendidikan nasional.
- 2) Menggunakan sejumlah besar penduduk Indonesia yang kebetulan berciri bukan sebagai orang Indonesia asli yang tanpa kemungkinan ke luar dari wilayah Republik Indonesia, dari usaha-usaha destruktif yang memusuhi pemerintah Indonesia, dengan jalan membina tunas-tunasnya untuk dapat berjiwa dan bersikap mental sebagai patriot Indonesia.
- 3) Meniadakan psychological unrest dari masyarakat Cina pemegang potensi ekonomi finansiil yang mendominasi kehidupan ekonomis bangsa Indonesia, dengan jalan memberi jaminan kesejahteraan spirituil bagi anak-anaknya, sehingga mereka tidak mudah dihasut untuk mengacaukan situasi di dalam negeri ataupun melarikan modalnya ke luar negeri. (Kantor Urusan Penduduk DKI Jakarta, 1972 : 97).

Sekolah Nasional Proyek Khusus adalah bersifat sementara, oleh karena itulah pada tahun 1974 sekolah-sekolah tersebut ditutup, dan pada tahun 1975 menjadi sekolah-sekolah Indonesia biasa. Sesuai dengan pengamatan di kota Palembang, anak-anak Cina peranakan yang berstatus warga negara Indonesia ataupun statusnya warga negara asing kebanyakan mereka bersekolah

pada Sekolah Xaverius dan Perguruan Methodist.

Apabila mereka telah memilih satu pilihan kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dengan melepaskan warga negara Cinanya, telah digolongkan kedalam adanya kecenderungan berpikap positif.

Akan tetapi mengingat sifat dan ikatan solidaritas mereka kuat, pendidikan yang berorientasikan kenegara Cina dan Belanda serta dari menganut status kewarganegaraan rangkap, dan adanya keterlibatan orang-orang Cina dalam pemberontakan G.30.S/PKI, maka penelitian ini ditujukan terutama dari segi perbuatan atau perilaku, yang terwujud dan tampak dalam interaksi sosialnya dalam melaksanakan program 5 K dalam lingkungan sekolah bagi siswa WNI keturunan Cina dan Pribumi.

Seperti yang diungkapkan oleh Tim Penatar PMP (1979 : 256) adalah :

" Perbuatan atau pengamalan Pancasila oleh anak dapat dianggap sebagai hasil akhir yang dicapai di dalam Pendidikan Moral, karena apabila seseorang mempunyai perbuatan baik maka ditafsirkan bahwa dia mempunyai sikap yang baik. Akan tetapi sebaliknya seseorang yang bersikap baik belum tentu mengamalkan secara baik pula."

Perilaku siswa yang diteliti adalah perilaku siswa WNI keturunan Cina dan Pribumi dalam melaksanakan program 5 K, karena program 5 K salah satu unsur pokok untuk mewujudkan ketahanan Sekolah.

Pada kenyataannya para orang tua siswa WNI keturunan Cina masih banyak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah

sekolah tertentu saja, sehingga tampak semacam pengelompokan.

Pengelompokan yang demikian dapat menumbuhkan kesan negatif pada siswa terhadap lingkungan sekolahnya, pergaulan antar sesama siswa terutama pergaulan siswa WNI keturunan Cina dengan siswa Pribumi.

2. Rumusan Masalah

Dari pembeberan masalah pada uraian terdahulu, maka disusun tesis dengan judul : " PERILAKU SISWA WNI KETURUNAN CINA DAN PRIBUMI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM 5 K."

(Studi deskriptif analitik tentang siswa-siswa SMA swasta di Kotamadya Palembang).

Penelitian diarahkan kepada perilaku siswa WNI keturunan Cina dan Pribumi dalam melaksanakan program 5 K tersebut di lingkungan sekolah.

Judul tesis tersebut bertitik tolak dari rumusan masalah sebagai berikut :

" Sampai seberapa jauhkah siswa WNI keturunan Cina dengan siswa Pribumi menunjukkan persamaannya dalam melaksanakan program 5 K ? "

Rumusan masalah tersebut di atas diturunkan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu :

(1) Apakah siswa WNI keturunan Cina memiliki perilaku positif dan dapat melaksanakan program 5 K di sekolah bersama dengan siswa Pribumi ?

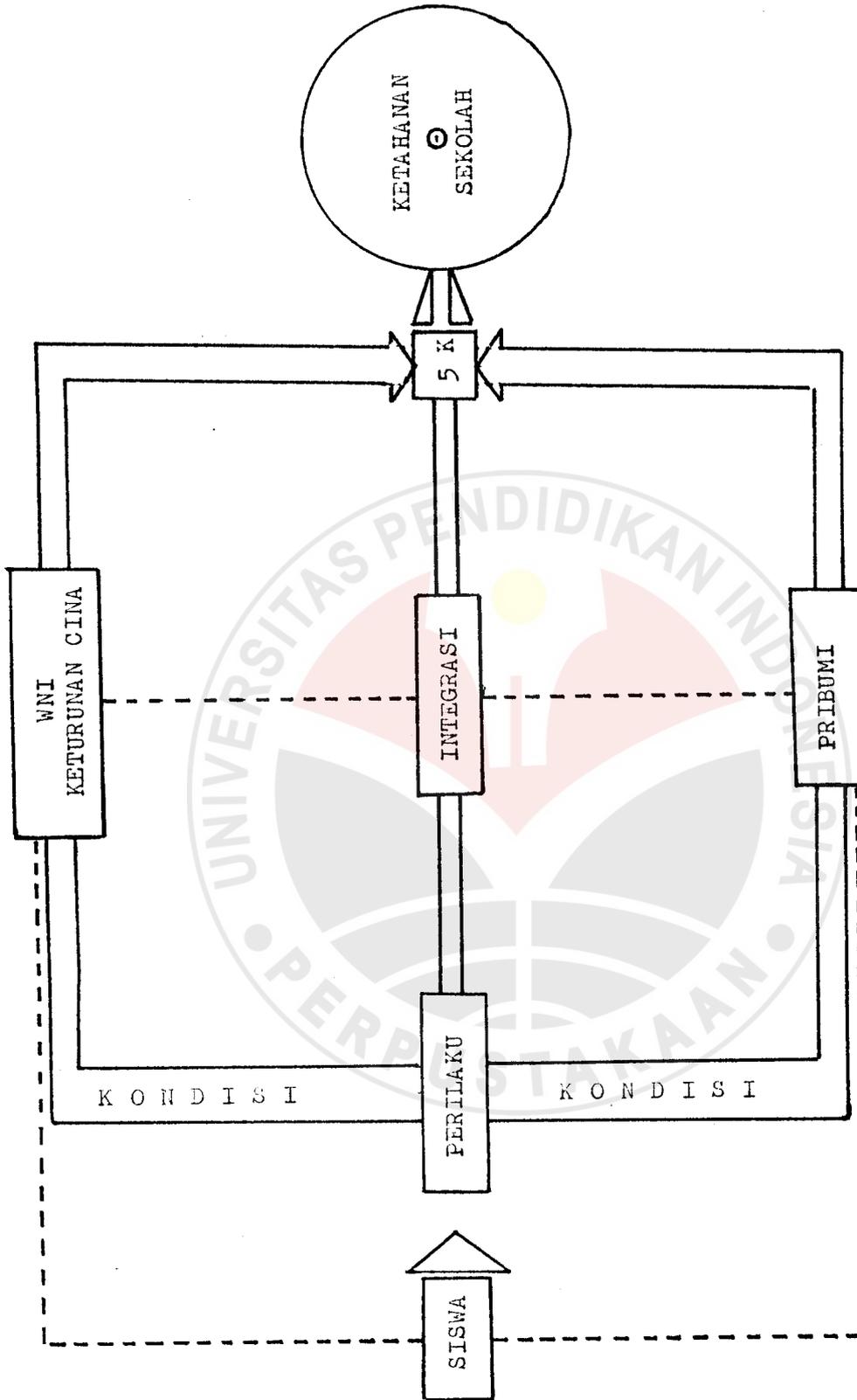
- (2) Apakah siswa WNI keturunan Cina dan Pribumi mempunyai persamaan dan perbedaan perilaku dalam melaksanakan program 5 K ?
- (3) Bagaimanakah persamaan dan perbedaan perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan siswa Pribumi dalam melaksanakan program 5 K di sekolah ?

Masalah penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

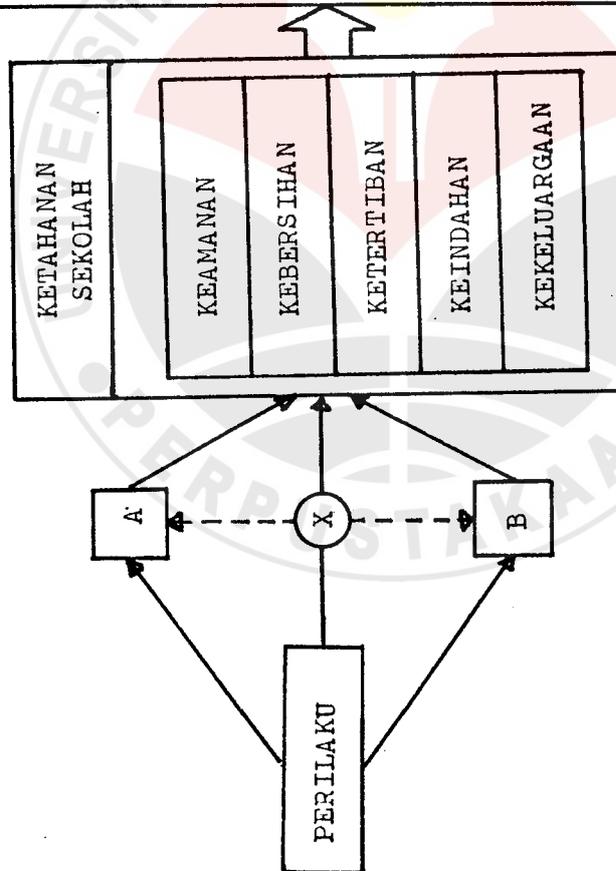
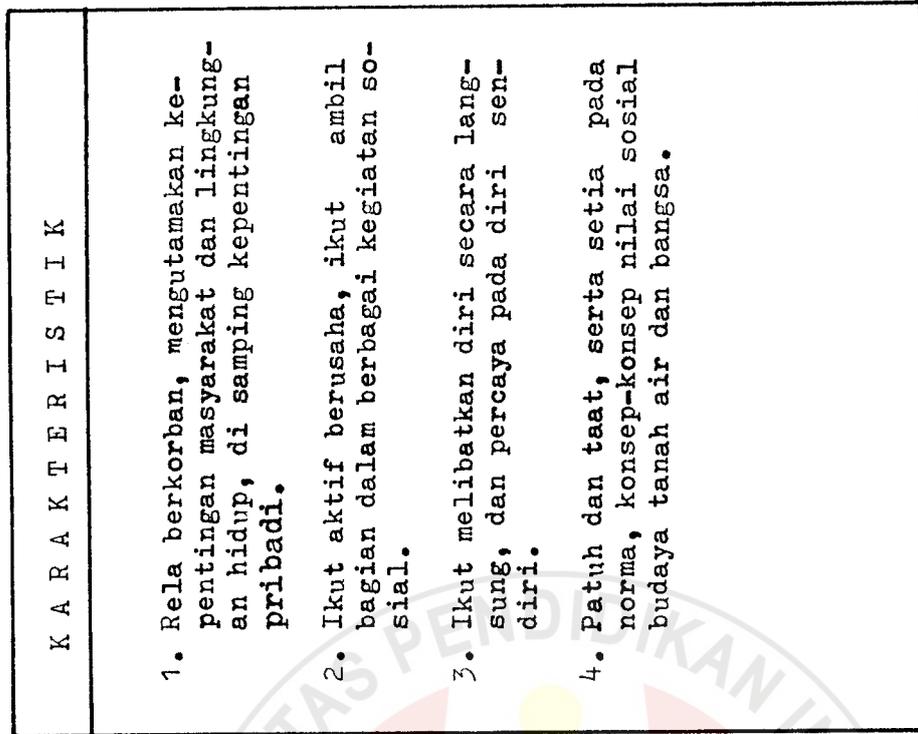
- (1) Inti masalah dalam penelitian ini adalah, masalah pelaksanaan program 5 K, di lingkungan sekolah.
- (2) Obyek penelitian diarahkan kepada perilaku 5 K yaitu Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan.
- (3) Yang menjadi subyek penelitian (sampel) ialah kelompok siswa WNI keturunan Cina dan siswa Pribumi.

Penelitian pada kelompok yang dimaksud (sampel) berada di Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam wilayah Kotamadya Palembang, pada sekolah-sekolah yang mempunyai siswa WNI keturunan Cina relatif banyak yaitu pada SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 2, SMA Methodist 1, SMA Methodist 2.

Adapun paradigma permasalahan dan penelitian diterakan pada bagan 2 dan bagan 3 berikut ini.



Bagan 2. Paradigma Permasalahan



KETERANGAN :

A = Siswa WNI Keturunan Cina

B = Siswa Pribumi

Bagan 3. Paradigma Penelitian

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah siswa WNI keturunan Cina dan siswa Pribumi mempunyai persamaan dalam melaksanakan program 5 K dalam lingkungan sekolah.
2. Memperoleh gambaran bagaimanakah perilaku siswa WNI keturunan Cina dan siswa Pribumi dalam melaksanakan program 5 K dalam lingkungan sekolah.
3. Mengetahui bagaimanakah persamaan dan perbedaan perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan siswa Pribumi dalam melaksanakan program 5 K di lingkungan sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam usaha :

1. Membina perilaku 5 K pada siswa melalui program 5 K dalam rangka meningkatkan ketahanan sekolah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap strategi proses belajar mengajar pada guru-guru, terutama guru Pendidikan Moral Pancasila (PMP), guru Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan guru Olah Raga agar perilaku 5 K selalu mendapat perhatian dan pengarahan sebaik-baiknya.
3. meningkatkan kecintaan siswa terhadap tanah air dan bangsa dengan perilaku 5 K sebagai perbuatan-perbuatan nyata melalui lingkungan sekolahnya.

E. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

a. Perilaku ialah hasil belajar yang dibentuk oleh informasi, dengan mempunyai aspek kognisi, motivasi, dan kecenderungan berbuat, sehingga merupakan perilaku individu yang bersangkutan.

Perilaku siswa WNI keturunan Cina masih terikat oleh ikatan solidaritas sosial budaya, prinsip untung rugi, dan berorientasi kepada tanah leluhur mereka, kendatipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia.

Sedangkan perilaku siswa Pribumi terikat oleh prinsip kemanusiaan, musyawarah, dan kekeluargaannya disamping kepentingan diri pribadi.

b. Perilaku anak-anak dalam usia belasan tahun dan mulai menginjak remaja, banyak yang sukar untuk dikendalikan, nakal, berbuat keonaran, dan bermacam-macam perbuatan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan sering merusak keindahan, mencorat-coret di tempat-tempat yang seharusnya dipelihara kebersihan dan keindahannya.

Siswa tingkat SMTA dengan usia seperti tersebut di atas tampaknya mempunyai kecenderungan penuh dengan kegelisahan.

Siswa-siswa WNI keturunan Cina, ataupun siswa Pribumi tidaklah terlepas dari adanya rasa kegelisahan yang tampak pada perilaku yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usia mereka.

2. Hipotesis

- a. Perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan perilaku siswa Pribumi memelihara keamanan yang merupakan unsur program 5 K dilingkungan sekolah menunjukkan banyak persamaan.
- b. Perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan perilaku siswa Pribumi memelihara kebersihan yang merupakan unsur program 5 K dilingkungan sekolah menunjukkan banyak persamaan.
- c. Perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan perilaku siswa Pribumi mentaati peraturan tata tertib sekolah atau memelihara ketertiban yang merupakan unsur program 5 K dilingkungan sekolah menunjukkan banyak persamaan.
- d. Perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan perilaku siswa Pribumi memelihara keindahan yang merupakan unsur program 5 K dilingkungan sekolah menunjukkan banyak persamaan.
- e. Perilaku siswa WNI keturunan Cina dengan perilaku siswa Pribumi dapat menjalin hubungan dalam suasana kekeluargaan yang merupakan unsur program 5 K dilingkungan sekolah menunjukkan banyak persamaan.

